

MAKALAH TEORI AKUNTANSI KEUANGAN
“STANDAR SETTING DAN EKONOMI POLITIKNYA”

Dosen Pengampu:

Dr. Pujiati, S.Pd., M.Pd.

Galuh Sandi, S.Pd., M.Pd.



Di Susun Oleh : Kelompok 8

Aura Liyanti Fani 2413031089

Salwa Trisia Anjani 2413031090

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN EKONOMI
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Proses Standar Setting dan Ekonomi Politiknya” dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan pemahaman penulis terhadap konsep standar akuntansi serta bagaimana proses penetapan standar tersebut tidak hanya dilihat dari sisi teknis, tetapi juga dari perspektif ekonomi dan politik yang melatarbelakanginya.

Dalam penyusunan makalah ini, penulis memperoleh banyak bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing, rekan-rekan mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan, masukan, dan motivasi selama proses penyusunan makalah ini.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, baik dari segi isi maupun penyajiannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami proses standard setting dan dinamika ekonomi politik di balik penyusunan standar akuntansi.

Bandar Lampung, 30 Agustus 2025

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
BAB II	2
PEMBAHASAN.....	2
2.1 Pengertian <i>Standar Setting</i> dalam akuntansi.....	2
2.2 Tahapan dalam proses penetapan <i>standar setting</i>	2
2.3 Keterkaitan Antara Ekonomi Politik dan Standar Setting	4
2.4 Pengaruh Kepentingan Ekonomi dan Politik dalam Penyusunan Standar Akuntansi	6
BAB III	8
PENUTUP	8
3.1 Kesimpulan	8
3.2 Saran.....	8
STUDY KASUS.....	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam dunia akuntansi, keberadaan standar akuntansi sangat penting untuk menciptakan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan. Standar akuntansi berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan agar dapat dibandingkan antar entitas dan antar periode. Proses penetapan standar (standard setting) bukan hanya bersifat teknis, melainkan juga sarat dengan unsur ekonomi politik.

Hal ini karena keputusan mengenai standar akuntansi sering kali melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda, seperti pemerintah, perusahaan, investor, auditor, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, pemahaman mengenai proses standard setting dan ekonomi politik di baliknya menjadi penting agar dapat melihat bagaimana keputusan akuntansi dibuat, siapa yang diuntungkan, serta bagaimana dinamika kekuasaan mempengaruhinya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan proses standar setting dalam akuntansi?
2. Bagaimana tahapan dalam proses penetapan standar akuntansi?
3. Apa yang dimaksud dengan ekonomi politik dalam konteks standar setting?
4. Bagaimana pengaruh ekonomi politik terhadap proses penetapan standar akuntansi?

1.3 Tujuan Masalah

1. Menjelaskan pengertian dan proses standar setting dalam akuntansi.
2. Menguraikan tahapan penetapan standar akuntansi.
3. Menganalisis keterkaitan antara ekonomi politik dan standar setting.
4. Menjelaskan pengaruh kepentingan ekonomi dan politik dalam penyusunan standar akuntansi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian *Standar Setting* dalam akuntansi

Standar setting adalah Proses untuk menetapkan standar akuntansi, yang sering disebut sebagai proses pengaturan standar, adalah suatu proses yang cukup rumit karena melibatkan berbagai aspek politik, bisnis, sosial, dan budaya. Aspek politik dapat dikatakan memiliki pengaruh yang kuat karena terdapatnya kepentingan yang terlibat dari pemerintah, sektor swasta, dan bahkan akuntan itu sendiri. Hal ini disebabkan karena standar akuntansi yang ditetapkan akan berlaku dan dijadikan panduan yang pasti mengikat semua pihak. Horngren (1973) dalam (Mardiyah, 2002:102), menyatakan bahwa penetapan standar akuntansi merupakan produk politik baik secara logika maupun secara empiris. Proses *standar setting* dalam akuntansi adalah serangkaian kegiatan atau tahapan yang dilakukan oleh lembaga pembuat standar akuntansi untuk merumuskan, meninjau, dan menetapkan aturan atau pedoman akuntansi yang akan digunakan secara umum dalam pelaporan keuangan. Proses ini bertujuan agar laporan keuangan yang disusun oleh berbagai entitas memiliki keseragaman (*comparability*), keandalan (*reliability*), dan relevansi (*relevance*) sehingga dapat digunakan secara efektif oleh para pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat. Beberapa lembaga pembuat standar akuntansi antara lain: IASB (*International Accounting Standards Board*) yaitu lembaga internasional yang menetapkan IFRS, FASB (*Financial Accounting Standards Board*) yaitu lembaga di Amerika Serikat yang menetapkan US-GAAP, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI yaitu lembaga di Indonesia yang menetapkan SAK.

2.2 Tahapan dalam proses penetapan *standar setting*

Proses penetapan standar akuntansi merupakan rangkaian kegiatan sistematis yang dilakukan oleh lembaga pembuat standar, seperti Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) IAI di Indonesia atau *International Accounting Standards Board* (IASB) di tingkat internasional. Tujuan dari proses ini adalah untuk menghasilkan standar akuntansi yang berkualitas, relevan, konsisten, dan dapat diterapkan secara luas oleh berbagai entitas pelaporan keuangan.

Tahapan-tahapan dalam proses penetapan standar akuntansi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah atau Isu Akuntansi

Tahap pertama adalah mengidentifikasi topik atau masalah akuntansi yang dianggap perlu untuk diatur atau diperbarui. Masalah tersebut dapat timbul karena adanya:

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan bisnis,

- b. Perkembangan teknologi yang memunculkan transaksi baru,
- c. Kebutuhan harmonisasi dengan standar internasional (IFRS),
- d. Permintaan atau masukan dari masyarakat profesi, akademisi, dan regulator.

Tahapan ini penting agar standar yang dihasilkan tetap relevan dengan praktik ekonomi modern dan mampu menjawab permasalahan baru yang muncul di dunia bisnis.

2. Pembentukan Tim Teknis dan Penelitian Awal

Setelah isu diidentifikasi, lembaga pembuat standar akan membentuk tim teknis atau komite kerja yang terdiri atas para ahli akuntansi, akademisi, praktisi, dan auditor. Tim ini bertugas melakukan:

- a. Kajian mendalam terhadap permasalahan yang ada,
- b. Studi literatur dan analisis terhadap standar lain yang sudah berlaku,
- c. Pengumpulan data dan bukti empiris untuk mendukung penyusunan standar baru.

Tujuan dari tahap ini adalah memastikan bahwa rancangan standar yang akan dibuat memiliki dasar konseptual dan ilmiah yang kuat.

3. Penyusunan Draf Awal atau *Exposure Draft*

Berdasarkan hasil penelitian, tim teknis menyusun rancangan awal standar akuntansi.

Rancangan ini biasanya dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang disebut *Exposure Draft* (ED) atau Kertas Kerja Diskusi (*Discussion Paper*).

Isi dari *Exposure Draft* meliputi:

- a. Tujuan penyusunan standar,
- b. Ruang lingkup dan konsep utama,
- c. Prinsip pengakuan, pengukuran, dan penyajian,
- d. Contoh penerapan dalam praktik,
- e. Dampak ekonomi terhadap entitas yang akan menerapkan standar tersebut.

Tahap ini merupakan fondasi utama sebelum dilakukan uji publik, karena menjadi bentuk awal dari usulan standar akuntansi baru.

4. Konsultasi dan Uji Publik (*Public Hearing*)

Setelah *Exposure Draft* diterbitkan, lembaga pembuat standar membuka kesempatan bagi publik dan pihak berkepentingan untuk memberikan masukan.

Proses ini dikenal dengan istilah konsultasi publik atau public hearing.

Masukan biasanya datang dari berbagai pihak seperti:

- a. Akuntan publik,

- b. Akademisi,
- c. Perusahaan,
- d. Regulator,
- e. Investor, dan masyarakat umum.

Tahapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa standar yang akan ditetapkan dapat diterapkan dengan baik dan mencerminkan kepentingan publik secara luas, bukan hanya kelompok tertentu.

5. Revisi dan Finalisasi Standar

Setelah semua masukan dari publik diterima dan dianalisis, tim teknis akan melakukan revisi terhadap *Exposure Draft*.

Proses revisi ini penting agar standar yang disusun:

- a. Menjadi lebih komprehensif dan dapat diterima oleh berbagai pihak,
- b. Tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan,
- c. Mengakomodasi kepentingan ekonomi yang seimbang.

Setelah direvisi, draf tersebut akan diajukan untuk disetujui oleh dewan atau lembaga pembuat standar.

6. Pengesahan dan Penerbitan Standar Akuntansi

Tahap akhir dari proses penetapan standar akuntansi adalah pengesahan dan penerbitan secara resmi. Di Indonesia, standar akuntansi yang telah disetujui oleh DSAK IAI akan diterbitkan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) atau Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Setelah disahkan, standar akan ditetapkan tanggal berlakunya (*effective date*) agar entitas memiliki waktu untuk menyesuaikan sistem pelaporan keuangannya.

7. Evaluasi dan Pembaruan Standar

Setelah diterapkan, standar akuntansi tetap harus dievaluasi secara berkala. Evaluasi dilakukan untuk menilai apakah standar tersebut masih relevan dengan kondisi ekonomi, teknologi, dan regulasi terbaru.

Jika ditemukan kelemahan atau perubahan kebutuhan, maka proses penyusunan standar akan dimulai kembali dari tahap awal.

2.3 Keterkaitan Antara Ekonomi Politik dan Standar Setting

Perumusan standar akuntansi (*standard setting*) merupakan proses yang secara mendasar terkait dengan pengaruh ekonomi dan politik. Dalam bidang ekonomi politik, standar akuntansi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat aturan teknis untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal, tetapi juga sebagai hasil interaksi antara

kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan kebijakan publik. Proses penetapan standar seringkali mencerminkan adanya tarik-menarik antara kepentingan kelompok ekonomi, lembaga pembuat kebijakan, dan tekanan politik yang muncul di masyarakat. Mardiyah (2002) menyatakan bahwa perumusan standar akuntansi merupakan proses politik, karena melibatkan beragam faktor dengan kepentingan yang saling bertentangan, mulai dari regulator dan profesional akuntansi hingga entitas ekonomi besar yang terdampak oleh keputusan regulasi. Dengan demikian, standar akuntansi pada akhirnya menjadi hasil kompromi yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada kepentingan sosial dan legitimasi politik dalam sistem ekonomi yang sedang berlaku.

Dari perspektif ekonomi politik, proses penetapan standar akuntansi menunjukkan bahwa keputusan ekonomi tidak terisolasi, melainkan sangat dipengaruhi oleh struktur kekuasaan politik dan tekanan sosial. Badan penetapan standar, seperti FASB (*Financial Accounting Standards Board*), seringkali menghadapi tekanan politik dari pemerintah, kelompok bisnis, atau asosiasi profesional yang memiliki kepentingan pribadi dalam mendefinisikan kebijakan akuntansi. Proses penetapan standar FASB menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang dikeluarkan berpotensi memengaruhi perekonomian, misalnya melalui perubahan laba yang dilaporkan, harga saham, atau keputusan investasi. Oleh karena itu, berbagai kelompok seringkali memberikan tekanan untuk memengaruhi keputusan badan penetapan standar dan memastikan bahwa hasilnya selaras dengan kepentingan mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa penetapan standar akuntansi bukanlah proses yang netral, melainkan dipengaruhi oleh interaksi antara hubungan kekuasaan dan kepentingan ekonomi. Serta keputusan ekonomi yang berasal dari penerapan regulasi juga dapat memengaruhi politik, stabilitas keuangan, dan kepercayaan publik terhadap sistem ekonomi secara keseluruhan.

Dari perspektif ekonomi politik, hubungan antara politik dan ekonomi dalam pengembangan standar akuntansi bersifat timbal balik. Politik memengaruhi pembentukan kebijakan akuntansi melalui mekanisme regulasi dan legislasi, sementara ekonomi memengaruhi arah kebijakan tersebut melalui konsekuensinya terhadap pasar dan perilaku organisasi. Terdapat tiga bentuk keterkaitan dalam proses ini :

- a. Politik dapat memengaruhi keputusan ekonomi melalui regulasi dan kebijakan
- b. Ekonomi memberikan tekanan kepada pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang menguntungkan secara ekonomi
- c. Keduanya saling membentuk struktur kelembagaan yang menentukan arah kebijakan akuntansi di masa mendatang.

Oleh karena itu, penetapan standar dapat dianggap sebagai instrumen di persimpangan antara kekuatan politik dan rasionalitas ekonomi. Standar akuntansi tidak hanya menentukan bagaimana entitas menyajikan informasi keuangan, tetapi juga memengaruhi alokasi sumber daya, stabilitas pasar modal, dan keadilan antara para pemangku kepentingan.

Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan politik, proses penetapan dan penerapan standar akuntansi tidak dapat dipisahkan dari perilaku manusia. Pentingnya memahami faktor-faktor perilaku seperti bias kognitif, kepercayaan, dan budaya organisasi dalam pengambilan keputusan akuntansi. Para penulis ini menemukan bahwa pengambilan keputusan keuangan seringkali tidak sepenuhnya rasional, melainkan dipengaruhi oleh persepsi dan pengalaman individu. Dalam konteks standar akuntansi, ini berarti bahwa efektivitas penerapannya tidak hanya bergantung pada kejelasan aturan tetapi juga pada bagaimana pelaku ekonomi memahami dan menanggapi. Misalnya, manajer atau akuntan dengan kecenderungan kuat untuk mengejar keuntungan jangka pendek dapat menafsirkan standar dengan cara yang menguntungkan kepentingan pribadi atau institusional mereka. Oleh karena itu, perilaku manusia merupakan faktor penting dalam membangun hubungan antara ekonomi politik dan efektivitas penerapan standar akuntansi.

2.4 Pengaruh Kepentingan Ekonomi dan Politik dalam Penyusunan Standar Akuntansi

Pengaruh politik terhadap perumusan standar akuntansi terlaksana melalui mekanisme *lobbying* dan intervensi politik. FASB, yang merupakan salah satu badan penyusun standar terbesar di dunia, secara rutin menerima tekanan politik melalui surat komentar, dengar pendapat publik, dan intervensi legislatif. Beberapa isu penting, seperti akuntansi minyak dan gas, akuntansi pensiun (SFAS-87), dan *accounting for stock options* menunjukkan bagaimana perubahan pada rancangan standar sering terjadi akibat tekanan politik dari kelompok industri atau anggota politik. Intervensi pemerintah dalam proses ini tidak dapat dihindari, karena standar akuntansi dianggap sebagai instrumen regulasi sosial dan ekonomi. Bahkan, SEC, sebagai otoritas pasar modal di Amerika Serikat, memiliki wewenang untuk membatalkan atau memodifikasi keputusan FASB jika dianggap bertentangan dengan kepentingan publik. Hal ini menunjukkan bahwa independensi badan penyusun standar selalu rentan terhadap kepentingan politik.

Kepentingan ekonomi juga secara signifikan memengaruhi arah standar akuntansi. Perusahaan dan manajer memiliki insentif ekonomi yang kuat untuk menerima atau menolak suatu standar berdasarkan dampaknya terhadap laba, struktur modal, atau nilai pasar. Setiap standar akuntansi membawa konsekuensi ekonomi, seperti peningkatan biaya agensi, risiko gagal bayar perjanjian utang, perubahan beban pajak, dan dampak di pasar modal. *Positive Accounting Theory* (PAT) dari Watts dan Zimmerman menjelaskan fenomena ini melalui tiga hipotesis utama, yaitu hipotesis rencana obligasi, hipotesis perjanjian utang, dan hipotesis biaya politik. Ketiga hipotesis ini menggambarkan bahwa perusahaan cenderung memilih atau mendukung standar akuntansi yang memberi mereka manfaat ekonomi terbesar seperti meningkatkan laba untuk meningkatkan obligasi, mengurangi kemungkinan gagal bayar perjanjian utang, atau mengurangi paparan politik dengan melaporkan laba yang lebih rendah.

Interaksi kepentingan ekonomi dan politik mengubah proses penyusunan standar akuntansi menjadi negosiasi yang kompleks. Kelompok industri dan perusahaan besar

memberikan tekanan untuk menjaga stabilitas keuangan mereka, sementara para pembuat kebijakan membela kepentingan politik dan tuntutan komponen utama mereka. Di saat yang sama, badan penyusun standar harus menjaga validitas proses tersebut untuk memastikan bahwa standar yang dihasilkan tetap dapat diterima, baik dari perspektif teknis maupun politik. Agenda penyusunan standar tidak semata-mata ditentukan oleh urgensi teknis tetapi seringkali, isu-isu tertentu ditambahkan ke dalam agenda karena tekanan politik, krisis ekonomi, atau kontroversi pasar. Dengan kata lain, standar yang diterbitkan merupakan hasil perebutan kekuasaan antara teori akuntansi, kepentingan pasar, dan dinamika kekuasaan.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Proses penyusunan standar akuntansi merupakan serangkaian kegiatan kompleks yang secara intrinsik terkait dengan pengaruh dinamika ekonomi dan politik. Meskipun standar akuntansi pada dasarnya dikembangkan untuk mencapai keterbandingan, relevansi, dan keandalan informasi keuangan, dalam praktiknya proses standardisasi melibatkan beragam pihak dengan kepentingan yang saling bertentangan. Badan-badan penyusun standar, seperti IASB, FASB, dan DSAK IAI, harus mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi, praktik bisnis yang terus berkembang, dan masukan dari pihak-pihak yang terdampak, termasuk pemerintah, perusahaan, investor, dan auditor. Dalam praktiknya, kelompok-kelompok tertentu seringkali memberikan tekanan untuk memengaruhi isi standar berdasarkan kepentingan ekonomi mereka sendiri, sementara intervensi politik dapat memengaruhi arah regulasi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa standar akuntansi bukanlah aturan teknis yang netral, melainkan hasil kompromi antara perebutan kekuasaan dan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemahaman tentang standardisasi dan ekonomi politik sangat penting bagi para pemangku kepentingan agar dapat menafsirkan standar secara lebih kritis, objektif, dan bertanggung jawab.

3.2 Saran

Untuk meningkatkan kualitas standar akuntansi, badan penyusun standar harus menjaga independensi dan transparansinya agar tidak mudah dipengaruhi oleh kepentingan politik atau ekonomi tertentu. Pelaku bisnis, akademisi, dan praktisi diharapkan berpartisipasi secara objektif dalam proses konsultasi publik agar standar yang dihasilkan lebih relevan dan dapat diimplementasikan secara efektif. Pemerintah juga harus bertindak sebagai pengawas yang netral untuk memastikan bahwa standar yang ditetapkan tetap melindungi kepentingan publik dan mendukung stabilitas ekonomi. Lebih lanjut, pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara ekonomi politik dan penyusunan standar diperlukan untuk memastikan penerapan standar akuntansi yang lebih akurat dan bertanggung jawab.

STUDY KASUS

FASB mengembangkan standar melalui proses formal dan ekstensif (*due process*), yang mencakup riset, debat publik, dan publikasi draf standar untuk mendapatkan komentar publik. Meskipun tampak teknis, proses ini sarat dengan kepentingan pribadi. Karena tingginya tingkat detail dalam standar FASB, banyak industri di Amerika Serikat memberikan komentar dan mengajukan keberatan ketika standar baru dapat memengaruhi laba atau rasio keuangan mereka. Hal ini menunjukkan keterlibatan sektor bisnis dan regulator dalam membentuk standar yang sedang dikembangkan.

Misalnya, ketika FASB mengembangkan standar yang memengaruhi pengakuan pendapatan dan klasifikasi aset, perusahaan besar secara aktif mengirimkan surat komentar, karena perubahan ini dapat memengaruhi valuasi investor dan pasar modal. Tekanan ekonomi dari sektor tertentu dapat memperlambat proses pengembangan standar, dan FASB harus menyeimbangkan pertimbangan teknis dengan kepentingan ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi politik secara signifikan memengaruhi arah standar akuntansi di Amerika Serikat.

Sementara itu di Indonesia, proses penetapan standar dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (DSAK IAI). Meskipun DSAK menggunakan mekanisme transparan melalui konsultasi publik, pendekatan Indonesia sangat dipengaruhi oleh keputusan internasional khususnya IFRS. Indonesia mengadopsi IFRS untuk meningkatkan daya saing global dan daya banding laporan keuangan antar negara. Keputusan untuk mengikuti IFRS juga merupakan bagian dari strategi ekonomi nasional untuk memastikan kredibilitas Indonesia di pasar internasional dan di mata investor asing. Dengan kata lain, kondisi ekonomi politik global memengaruhi arah pengembangan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia.

Faktor politik internal juga dapat berperan. Ketika Indonesia mengadopsi IFRS, beberapa sektor bisnis terutama property, leasing, dan Perusahaan dengan struktur sewa kompleks memberikan banyak masukan karena adanya kekhawatiran bahwa standar baru seperti PSAK 73 Sewa Guna Usaha akan meningkatkan kewajiban perusahaan. Meskipun jurnal tersebut tidak secara khusus menganalisis PSAK 73, fenomena ini menunjukkan bahwa sektor tertentu dapat memengaruhi penyesuaian lokal terhadap standar IFRS sebelum diratifikasi sebagai PSAK.

Implikasi kasus standar setting :

1. Di Amerika Serikat, pengembangan standar dipengaruhi oleh kelompok industri besar, regulator, dan kepentingan pasar modal. Perdebatan tentang standar akuntansi seringkali didorong oleh dampak ekonomi terhadap laba perusahaan dan kepentingan investor.
2. Di Indonesia, pengembangan standar dipengaruhi oleh dua kekuatan:
 - a. Tekanan ekonomi global, yaitu kebutuhan untuk mengikuti IFRS agar laporan keuangan Indonesia dapat diperbandingkan secara internasional.
 - b. Tekanan ekonomi domestik, yaitu masukan dari perusahaan dan regulator lokal untuk memastikan bahwa standar tersebut tidak terlalu membebani bisnis.
3. Baik FASB maupun IAI melakukan konsultasi publik, tetapi FASB menghadapi tekanan politik dan ekonomi yang lebih besar karena Amerika Serikat memiliki pasar modal yang jauh lebih besar dan lebih kompleks.

Proses penetapan standar akuntansi bukan hanya sekadar masalah teknis, tetapi juga bagian dari ekonomi politik. Standar yang akhirnya ditetapkan merupakan hasil keseimbangan antara kebutuhan akan informasi keuangan yang berkualitas, kepentingan pelaku ekonomi, dan orientasi kebijakan regulasi. Baik Amerika Serikat maupun Indonesia menghadapi tantangan serupa yaitu menjaga keseimbangan antara standar yang berkualitas dan merespons dinamika ekonomi, politik, dan pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Ainul Aida Mardiyah (2022), Dampak Proses Politik dan Konsekuensi Ekonomi dalam Pembentukan Suatu Standar, *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 3 No. 2, hal: 96-123.

Daham Muhammad Sabar, Lince Bulutoding, Farid Fajrin, *EXPLORING THE IMPACT OF BEHAVIORAL FACTORS ON ACCOUNTING SYSTEMS AND FINANCIAL DECISION-MAKING*.

Melinda, Nada. "Hubungan Proses Politik Dan Konsekuensi Ekonomi Mempengaruhi Pembentukan Standar Akuntansi Oleh Fasb." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan* 1.3 (2024): 20-28.

Nur Aryanto dkk (2025), Perbandingan Penyusunan Standar Akuntansi Keuangan di Amerika Serikat dan di Indonesia, : *Jurnal ANC*, Vol. 01, No.3.

NonCommercial 4.0 International License

Smith Alan Purba & Elza Rahmania (2018), Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb, *Jurnal Akuntabel*, Vol.2.

Purba, A. S., & Utami, E. R. D. (2018). Dampak proses politik terhadap pembentukan standar akuntansi studi literatur fokus kepada fasb. *AKUNTABEL*, 15(2), 73-83.

Riwukore, Jefirstson Richset, Fellyanus Habaora, and Terttiaavini Terttiaavini. "Good Governance Dalam Mengukur Kinerja Lembaga Negara." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 7.1 (2022).

